

PROGRAM DISTRIBUSI AIR BERSIH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

Nilia Agnestia Hanifah

NPP. 31.0560

Asdaf Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Manajemen Keamanan dan keselamatan Publik

Email: 31.0539@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Luh Putu Vera Astri Pujayanti, AP., MH.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Bojonegoro Regency is a district with disaster-prone areas, one of which is drought. Clean water distribution is one of the government's programs to support the water needs of the affected people of Bojonegoro Regency. This program is synergized to reduce disaster risk due to a long drought in 2023 resulting in extreme drought. Where there is an increase in the number of requests for clean water to BPBD which is considered very significant compared to the previous year in the face of drought. **Objective:** The purpose of this study is to review and determine the implementation of the Clean Water Distribution Program in drought disaster management in Bojonegoro Regency. **Method:** This study uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques include in-depth interviews (12 informants), observation, and documentation. **Results/Findings:** Based on the results of the study, it shows that the implementation of the Clean Water Distribution Program by BPBD Bojonegoro Regency has gone quite well. Although the fulfillment of clean water needs cannot be said to be able to meet the basic needs of water in humans. As explained in 4 dimensions, the implementation of the Clean Water Distribution Program has been carried out and the community has felt the existence of the program so as to minimize losses due to drought disasters. As for the implementation, there are still some obstacles in its implementation. **Conclusion:** The implementation of the Clean Water Distribution Program went quite well and in accordance with regulations and objectives in drought disaster management despite the very significant increase in demand for clean water from previous years.

Keywords: Clean Water Distribution, Disaster Management, Drought

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten dengan wilayah rawan bencana salah satunya yaitu kekeringan. Distribusi air bersih merupakan salah satu program pemerintah untuk menunjang kebutuhan air masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang terdampak. Program ini disinergikan untuk pengurangan resiko bencana akibat kemarau panjang pada tahun 2023 yang mengakibatkan kekeringan ekstrim. Di mana terjadi peningkatan pada jumlah permintaan air bersih kepada BPBD yang dinilai sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dalam menghadapi bencana kekeringan.. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui pelaksanaan Program Distribusi Air Bersih dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam (12 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Distribusi Air Bersih oleh BPBD Kabupaten Bojonegoro telah berjalan cukup baik. Meskipun pemenuhan kebutuhan air bersih belum bisa dikatakan dapat memenuhi kebutuhan pokok air pada manusia. Seperti yang telah dijelaskan dalam 4 dimensi, pelaksanaan Program Distribusi air Bersih telah terlaksana dan masyarakat telah merasakan adanya program tersebut sehingga meminimalisir kerugian akibat bencana kekeringan. Adapun masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. **Kesimpulan:** Pelaksanaan Program Distribusi Air Bersih berjalan cukup baik dan sesuai dengan regulasi dan tujuan dalam penanggulangan bencana kekeringan meskipun dengan kenaikan permintaan air bersih yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Kata kunci: Distribusi Air Bersih, Penanggulangan Bencana, Kekeringan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara beriklim tropis, Indonesia memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim tropis yang terjadi di Indonesia ditandai dengan adanya perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang ekstrim. Secara geografis, Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Letak geografis ini sebagai penyebab Indonesia berada di belahan bumi dengan iklim muson tropis yang sensitif terhadap iklim *El-Nino Southern Oscillation* (ENSO). Adanya ENSO menyebabkan terjadi kekeringan. Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari 22 kabupaten yang mengalami kekeringan kritis dan telah mengeluarkan penetapan berupa status siaga darurat bencana kekeringan. Bencana kekeringan yang berkepanjangan dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, seperti: kelaparan, wabah penyakit, dan lain sebagainya, hingga mengalami gagal panen.

Tabel 1.2
Data Permintaan Air Bersih Tahun 2018 s.d. 2023

No	Tahun	Jumlah Daerah Membutuhkan Air Bersih		
		Kecamatan	Desa	Dusun
1	2018	17	71	116
2	2019	21	75	-
3	2020	16	42	71
4	2021	8	17	29

5	2022	5	7	9
6	2023	24	117	207

Sumber: BPBD Kabupaten Bojonegoro, 2023

Hampir di setiap tahunnya beberapa kecamatan di Kabupaten Bojonegoro mengalami kekeringan yang mengakibatkan kurangnya air bersih ketika musim kemarau tiba. Berdasarkan data lima tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan 2022 permintaan air bersih sangat menurun yang artinya kekeringan di wilayah Bojonegoro mulai berkurang, akan tetapi pada tahun 2023 terjadi peningkatan permintaan air bersih yang sangat signifikan. Pada saat musim kemarau sumber air akan mengering, oleh karena itu pihak BPBD Kabupaten Bojonegoro melaksanakan program distribusi air bersih secara berkala. Sebesar Rp 263.850.000 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) telah diajukan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan APBD.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, diperlukan aksi nyata oleh pemerintah untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya atas dampak yang telah terjadi akibat bencana alam yang melanda. Program distribusi air bersih merupakan salah satu dari beberapa strategi dalam penanggulangan kekeringan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah sebagai penanggung jawab telah membentuk BPBD selaku badan yang menanggulangi bencana. Penanggulangan bencana kekeringan berupa distribusi air bersih yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Sampai dengan tahun 2022 data dari BPBD menunjukkan penurunan permintaan air bersih dari masyarakat. Akan tetapi, pada tahun 2023 terjadi kemarau panjang yang disebabkan oleh fenomena El-Nino sehingga terjadi peningkatan terhadap permintaan air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan Program Distribusi Air Bersih yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bojonegoro dalam penanggulangan bencana kekeringan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pengamat sebelumnya sehubungan dengan tema penelitian ini yang berkaitan dengan penanggulangan bencana kekeringan. Penelitian terdahulu dapat pula dijadikan acuan ataupun perbandingan peneliti dan mengetahui persamaan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh (Suryapusita, Saputra, Suryoto, & Ramdan, 2022) dengan judul “Upaya Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Kekeringan Di kabupaten Bojonegoro dengan hasil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan beberapa proyek, antara lain pembangunan waduk, sumur bor, fasilitas pengolahan air, geo membran, toren air, dan jaringan pipa air bersih (dalam pembangunan) serta inisiatif sosialisasi untuk menangani kekeringan. Penelitian oleh (Dewi & Chayati, 2020) “Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Untuk Menanggulangi Bencana Kering Kritis di Desa Moncek Timur Kabupaten Sumenep” dengan hasil Distribusi Air Bersih Menggunakan System Pengaliran Transmisi Dengan Pemanfaatan Pompa Dan Distribusi Gravitasi. Dengan Pemakaian Bergilir Selama 8 Jam/Hari. Penelitian oleh (Purnomo, Halik, Dhokhikah, Absari, & Salsa, 2021) dengan hasil menunjukkan bahwa indeks kekeringan (SPI-12) memiliki kesesuaian dengan kondisi kekeringan yang terjadi di lapangan. Kemudian, penelitian oleh (Firdaus, 2023) “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur” dengan hasil strategi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep cukup baik namun, perlu ditingkatkan lebih lanjut. Terdapat juga jurnal dengan judul “Kondisi Dan Konsep Penanggulangan Bencana Kekeringan Di Jawa Tengah” oleh (Adi, 2011) dengan hasil Konsep mitigasi keekkringan yang diusulkan terbagi dalam penanganan jangka pendek, menengah dan panjang, serta analisa upaya implementasi dilakukan terutama untuk pengobatan jangka menengah. Ada juga penelitian dari (Wisaksono, 2018) dengan judul “Teknik Penanggulangan Bencana Kekeringan di Sub DAS Bompon Desa Margoyoso dengan Menggunakan Metode Trans Basin dari Mataair Sub DAS Kaliwungu Desa Kaliabu, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah” dan penelitian dengan judul “Mitigasi Bencana Dalam Mengatasi Kekeringan Di Kelurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman daerah Istimewa Yogyakarta” oleh (Minhar & Aco, 2021) dengan hasil strategi, kebijakan dan bentuk program yang didapatkan dari pemerintah dalam mengatasi kekeringan di Kalurahan Gayamharjo berbeda-beda pada setiap wilayah atau dusun. Strategi yang digunakan yaitu pemetaan, pemantauan, penyebaran informasi, sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan dan Pendidikan, serta peringatan dini. Bentuk mitigasi bencana yang dilaksanakan di Kalurahan Gayamharjo saat ini yaitu drooping air menggunakan tangki, memanfaatkan sumber mata air, reboisasi, sumur bor, bak penampungan air, PAMSIMAS, dan PDAM. Penelitian selanjutnya (Santika & Saputro, 2019) “Sistem Informasi Distribusi Air Bersih Berbasis Website Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Provinsi Jawa Tengah” dengan hasil dilakukan suatu perancangan sistem yaitu sebuah Sistem Informasi Distribusi Air Bersih berbasis Website. Dihasilkan sistem informasi distribusi air bersih yang diharapkan mampu menjadi sumber referensi yang mudah diakses oleh pengguna non-teknis untuk mengeksplorasi hasil – hasil statistik, dan memudahkan pegawai dalam melakukan pendataan. Peneliti (Setiyoningrum & Mulyanti, 2023) dengan penelitian “Rencana Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro Untuk Menangani Bencana Kekeringan” dengan hasil untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana BPBD Kabupaten Bojonegoro menggelar pelatihan dan pembentukan Desa Tangguh Bencana di beberapa Desa. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membentuk sinergi langsung dengan masyarakat dalam mengantisipasi potensi bencana alam. Terdapat juga artikel dari (Septiarum, Maesaroh, & Widowati, 2023) dengan judul “Manajemen Mitigasi Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menanggulangi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Boyolali” dari hasil kajian menunjukkan masih terdapat permasalahan dengan fenomena penggerak yaitu dalam pelaksanaan kegiatan timbul rasa cemburu antar masyarakat, penggunaan air bersih yang tidak baik dan program/kegiatan yang tidak ada berjalan lebih lama.

1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah

Adapun beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu selain untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Distribusi Air Bersih dalam penanggulangan bencana kekeringan, pada penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan program bencana alam kekeringan serta mengetahui bagaimana upayanya dalam menghadapi faktor penghambat tersebut. Selain itu pengukuran atau indikator yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini penulis menggunakan pendapat dari George C. Edward III dalam Leo Agustino (2022:154) bahwasanya dalam teori tersebut disebut juga dengan istilah *Direct and Indirect Impact of Implementation*. Dengan teori tersebut penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Distribusi Air Bersih yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bojonegoro dalam penanggulangan bencana alam kekeringan.

1.5 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan Program Distribusi Air Bersih dalam penanggulangan bencana alam kekeringan di Kabupaten Bojonegoro, kedua untuk mengetahui faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan Program Distribusi Air Bersih dalam penanggulangan bencana alam kekeringan. Dan untuk mengetahui upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan Program Distribusi Air Bersih.

II. METODE

Dalam penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang sedang diteliti tanpa melakukan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diamati. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Program Distribusi air Bersih yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bojonegoro dalam Penanggulangan Bencana Kekeringan. Menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2022:154) di mana terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan suatu program. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara secara semi struktur, observasi dan studi dokumentasi. Dimana data bersumber dari informan yang berjumlah 12 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris BPBD Kabupaten Bojonegoro, Kepala Seksi Pencegahan/Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Anggota BPBD Kabupaten Bojonegoro, 2 tokoh masyarakat, dan 5 masyarakat yang terdampak kekeringan. Dalam pengumpulan data dokumentasi penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, laporan hasil kerja BPBD, Arsip BPBD, serta gambar/foto yang berkaitan dengan penanggulangan bencana kekeringan. Penulis juga melakukan observasi terhadap kondisi beberapa wilayah kekeringan di Kabupaten Bojonegoro. Adapun beberapa cara analisis data dengan menggunakan 4 tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan mengenai Program Distribusi Air Bersih dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro, terdapat 4 dimensi yang digunakan untuk menentukan keberhasilan Program Distribusi Air Bersih.

3.1 Program Distribusi Air Bersih dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bpojonegoro

Keempat dimensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi/sikap pelaksana dan (4) Struktur birokrasi. Dari dimensi tersebut, data dan informasi akan disajikan melalui sejumlah indikator, dan lebih rinci akan dijelaskan secara berurutan.

3.1.1 Komunikasi

Penelitian terkait dengan komunikasi pada pelaksanaan program distribusi air bersih dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro merupakan hal penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program. Apabila dilakukan dengan baik akan menghasilkan sebuah komunikasi yang baik pula, sehingga menunjang perwujudan program. Proses penyaluran komunikasi

atau transmisi dalam pelaksanaan program distribusi air bersih dalam penanggulangan bencana kekeringan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai pelaksana ialah dengan diadakannya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Sosialisasi yang diupayakan yaitu berupa penyampaian terkait penghematan penggunaan air pada musim kemarau yang dilakukan oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) dan masing-masing Desa Tangguh Bencana (Destana) yang dimiliki oleh beberapa desa, dimana di dalam keanggotaannya terdiri dari masyarakat desa itu sendiri. Kejelasan arah dan tujuan terkait dengan Pelaksanaan Program Distribusi Air Bersih dalam penanggulangan bencana kekeringan ini sudah baik dan jelas, dan sudah diarahkan kepada masyarakat terdampak kekeringan dengan tujuan meminimalisir adanya kerugian yang lebih besar diakibatkan oleh kekeringan.

3.1.2 Sumber Daya

Dalam tujuan untuk terwujudnya suatu program untuk mencapai target, diperlukan adanya faktor pendukung. Salah satunya yaitu sumber daya. Sumber Daya Manusia menjadi faktor utama suatu keberhasilan dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini sumber daya manusia yang terdapat di BPBD Kabupaten Bojonegoro banyak yang usianya diatas 35 tahun.

Tabel 4.9
Jumlah Pegawai Berdasarkan Umur

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	< 25 tahun	-	-	-
2	25-35 tahun	-	-	-
3	> 35 tahun	6	6	12
	Jumlah Total	6	6	12

Sumber: BPBD Kabupaten Bojonegoro

yang artinya kebanyakan pegawai sudah memasuki masa tua dan menjelang pensiun. Padahal usia menjadi salah satu faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap produktivitas kinerja. Dalam hal ini tentunya usia yang lebih muda akan mempunyai tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia tua, yang dalam hal fisiknya lebih lemah dan terbatas. Ditambah lagi dengan aktivitas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah banyak memiliki kegiatan di luar ruangan dan terjun ke lapangan. Kemudian sumber daya pendukung juga mempengaruhi keberhasilan suatu program. Sumber daya pendukung yang dimaksud yakni fasilitas fisik maupun sumber pembiayaan program agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sumber daya pendukung yang terdapat di BPBD Kabupaten Bojonegoro masih belum memadai untuk pelaksanaan program tersebut apabila program tersebut hanya berasal dari BPBD Kabupaten Bojonegoro. Adapun dari segi anggaran BTT dan APBD. Dalam pencairan BTT ini melalui surat keputusan bupati tentang kedaruratan. Maka selanjutnya dana tersebut baru dapat dicairkan.

3.1.3 Disposisi/Sikap

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan suatu program. Jika pelaksanaan suatu program ingin berjalan dengan efektif, maka para pelaksana program tidak hanya dapat mengetahui apa yang akan dilakukan akan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Terlaksananya suatu program dilihat juga dalam hal

pengaturan birokrasi. Hal ini dimaksudkan pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kompetensi, integritas, kapabilitas, dan loyalitasnya. Selanjutnya, pengaturan suatu birokrasi nantinya juga akan berpengaruh pada sistem pelayanan publik yang optimal. Penentuan target merupakan salah satu pendorong bagi pelaksana untuk dapat mencapai tujuan dari target tersebut. Kemudian, adanya Insentif menurut Edward III merupakan pemberian penghasilan tambahan atas suatu pekerjaan yang nantinya juga akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana akan melaksanakan kebijakan dengan baik.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memberikan pengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu pelaksanaan program. Meskipun sumber daya untuk pelaksanaan suatu program telah memenuhi, suatu kemungkinan akan bisa terjadi apabila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik adalah Standar Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Standar Operational Procedure (SOP) menjadi hal mendasar dalam suatu aspek struktural. Dalam pelaksanaan Program Distribusi Air Bersih dalam penanggulangan bencana kekeringan sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operational Prosedure (SOP) dan telah dilakukan evaluasi sehingga dalam pelaksanaannya akan menjadi lebih baik setiap tahunnya. Juga SOP yang dibuat sudah melalui perencanaan yang matang dan telah dilaksanakan sosialisasi secara keseluruhan. Menurut Edward III, fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja. Pada bidang penanggulangan bencana fragmentasi merupakan hal yang sangat inti dalam pelaksanaan program kerja. Hal ini dikarenakan adanya data hingga pelaksanaan kegiatan, penanggulangan bencana tidak dapat berdiri sendiri sehingga diperlukan adanya kerjasama, dengan adanya fragmentasi sebuah struktur birokrasi akan lebih efektif. BPBD Kabupaten Bojonegoro dalam program ini telah melaksanakan koordinasi dan kerjasama, di mana hal ini sangat penting untuk dilakukan. Pada program distribusi air bersih ini tentunya yang namanya koordinsi dan kerjasama baik dalam internal sesama pegawai di BPBD untuk perencanaan dan evaluasi misalnya. Kemudian, untuk eksternalnya seperti kerjasama dengan pihak ketiga yang di mana akan bersurat kepada Pejabat Pengadaan menggunakan E-katalog itu dalam mendapatkan air bersih untuk didistribusikan. Kemudian, untuk tata laksana sendiri berdasarkan rencana kontijensi yang sudah ada.

3.2 Hambatan dalam Program Distribusi Air Bersih dalam penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro

Dalam proses penelitian yang telah dilakukan masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Program Distribusi Air Bersih dalam penanggulangan bencana kekeringan. Seperti ada pada kurangnya sumber daya manusia dalam proses pelaksanaan distribusi air bersih. Sehingga membuat pegawai yang telah ditugaskan untuk program tersebut harus bekerja ekstra dilihat dari banyaknya permintaan air bersih yang telah masuk. Adapun hambatan selanjutnya yaitu, jarak antara sumber air dengan daerah yang terdampak bencana kekeringan yang terhitung jauh sehingga membutuhkan waktu dalam proses pengirimannya. Distribusi wilayah kekeringan dengan sumber air ini cukup jauh sehingga hal ini menyulitkan bagi kedua belah pihak karena selain memakan biaya dan tenaga lebih, juga membutuhkan waktu untuk pendistribusian, sehingga menjadikan pelaksanaannya kurang efektif. Terkendalanya pencairan dana dalam pengiriman air bersih menjadikan berbagai kegiatan terhambat bahkan menjadikan masyarakat yang terdampak kekeringan menjadi protes. Berdasarkan wawancara bahkan pencairan anggaran lebih dari 10 hari setelah pengajuan, yang di mana seharusnya pengiriman air harus segera dilaksanakan akan tetapi masih terkendala pencairan anggaran.

Kemudian, kurangnya jumlah armada juga menjadi kendala saat pelaksanaan Program Distribusi Air Bersih. Pada saat proses pengiriman air terdapat juga masyarakat yang tidak tertib dengan apa yang telah ditetapkan. Sehingga, mengabaikan terjadinya permasalahan kecil yang dihadapi oleh distributor, dan merusak jadwal pengiriman yang sudah dibuat.

3.3 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Program Distribusi Air Bersih

Berbagai macam hambatan dalam pelaksanaan program distribusi air bersih dalam penanggulangan bencana kekeringan tentunya terdapat upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut dan jalan keluar terlaksananya program distribusi air bersih. Adanya kerjasama dengan pihak lain tentunya akan menjadikan sebuah program akan terlaksana dengan lebih baik apabila dilaksanakan suatu koordinasi dengan baik. Salah satunya dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan program tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan suatu program. Sehingga, suatu program berjalan dengan lebih baik. Kemudian, adanya tim monitoring dari pihak BPBD sendiri akan menjadikan masyarakat yang akan diberikan bantuan air bersih lebih kondusif dan teratur, sehingga pelaksanaan distribusi air bersih dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dibuat oleh BPBD Kabupaten Bojonegoro. Melakukan kerjasama dengan pihak lain tentunya juga akan menemukan upaya yang akan diberikan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik. Seperti pada untuk tempat pengambilan air yang jauh dari wilayah kekeringan ini, dari pihak BPBD hanya mengikuti dari pihak ketiga, yaitu dengan mencari kemudian membeli dari sumber air terdekat sehingga tidak menyita banyak waktu. Akan tetapi dengan konsekuensi di beberapa wilayah menjadikan harga beli air lebih mahal terutama Ketika membeli dari sumber air pribadi masyarakat. Dengan keterbatasan yang ada dengan sarana dan prasarana yang terbatas, adanya kerjasama dengan pihak ketiga proses pelaksanaan program akan lebih baik untuk menemukan solusi dalam hambatan yang tengah terjadi.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Program distribusi air Bersih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap bencana kekeringan di Kabupaten Bojonegoro, peneliti merumuskan beberapa temuan yang ditinjau melalui empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Penemuan ini berbeda dengan penemuan-penemuan sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus kepada pelaksanaan Program Distribusi Air Bersih. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada BPBD sebagai badan yang menjalankan Program Distribusi Air Bersih dalam penanggulangan bencana kekeringan. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam mengamalkannya, seperti kesadaran masyarakat yang masih terbatas untuk secara aktif mendukung segala upaya yang dilakukan BPBD. Hal ini serupa dengan penelitian (Suryapuspita, Saputra, Suryoto, & Ramdan, 2022). Penelitian ini lebih berfokus pada upaya yang dilakukan dalam mitigasi bencana kekeringan. Menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Bojonegoro dalam penanggulangan bencana kekeringan. Desa-desa di Kabupaten Bojonegoro telah merasakan manfaat dari kegiatan mitigasi kekeringan struktural dan non-struktural BPBD.

Dalam penelitian (Dewi & Chayati, 2020) pemenuhan kebutuhan air bersih menggunakan sistem Pengaliran Transmisi Dengan Pemanfaatan Pompa Dan Distribusi Gravitasi. Dengan Pemakaian Bergilir Selama 8 Jam/Hari. Di dalam penelitian ini juga terdapat upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana kekeringan berupa pengeboran sumur, sedangkan penemuan yang ditemukan yaitu berupa Program Distribusi Air Bersih sebagai penanggulangan bencana. Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Purnomo, Halik, Dhokhikah, Absari, & Salsa, 2021) Salsa Penilaian Bencana Kekeringan dan Strategi Penyediaan Air Bersih di Wilayah Utara Kabupaten Lumajang dengan hasil

penilaian bencana kekeringan dengan indeks kekeringan (SPI-12) dapat dinyatakan bahwa indeks kekeringan tertinggi terjadi di bulan September 2018 dengan nilai indeks kekeringan -2.33 dengan kategori kekeringan ekstrem atau amat sangat kering. Penilaian kekeringan (SPI-12) memiliki kesesuaian pola dengan kondisi kekeringan yang terjadi di lapangan. Hal ini ditunjukkan pola SPI-12 yang mendekati dengan pola jumlah dropping air. Menggunakan metode Standardized Precipitation Index (SPI) dengan input data curah hujan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Distribusi air Bersih dalam penanggulangan bencana kekeringan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik. Dapat dilihat dari dimensi yang ada bahwa program tersebut telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Meskipun, masih terdapat hambatan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Bojonegoro akan terus melaksanakan koordinasi dan evaluasi untuk pelaksanaan program selanjutnya agar berjalan dengan baik. BPBD Kabupaten Bojonegoro telah mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu tempat saja sebagai lokasi pengambilan data.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terkhususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro, Kepala Pelaksana beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, Dosen pembimbing dan penguji serta pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, H. P. (2011, Juli). Kondisi Dan Konsep Penanggulangan Bencana Kekeringan Di Jawa Tengah.
- Dewi, E. Y., & Chayati, C. (2020). Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Untuk Menanggulangi Bencana. 14.
- Firdaus, D. N. (2023). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Alam Kekeringan Di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. 6-11. Retrieved from <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12990>
- Minhar, D. R., & Aco, F. (2021). Mitigasi Bencana Dalam Mengatasi Kekeringan Di Kalurahan Gayamharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. doi:<https://doi.org/10.30588/jep.v5i1.855>
- Purnomo, S., Halik, G., Dhokhikah, Y., Absari, R. U., & Salsa, A. (2021). Penilaian Bencana Kekeringan dan Strategi Penyediaan Air Bersih di Wilayah Utara Kabupaten Lumajang. 102.

- Santika, F. N., & Saputro, N. D. (2019, Desember 25). Sistem Informasi Distribusi Air Bersih Berbasis Website Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Provinsi Jawa Tengah. 226-231.
- Septiarum, F., Maesaroh, & Widowati, N. (2023). Manajemen Mitigasi Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menanggulangi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Boyolali. *12*(permasalahan yaitu terkait dengan actuating (penggerakan) bencana di Kabupaten Boyolali), 8-11. doi:10.14710/jppmr.v12i3.39730
- Setiyoningrum, S. A., & Mulyanti, H. (2023, Februari 13). Rencana Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro Untuk Menangani Bencana Kekeringan. (Cara BPBD menangani darurat bencana kekeringan, rencana mitigasi dan kesiapsiagaan BPBD untuk menangani bencana kekeringan). Retrieved from ejournal.unigoro.ac.id
- Suryapuspita, M., Saputra, A. S., Suryoto, & Ramdan, N. A. (2022). Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 4-11.
- Wisaksono, W. (2018). Teknik Penanggulangan Bencana Kekeringan di Sub DAS Bompon Desa Margoyoso dengan Menggunakan Metode Trans Basin dari Mataair Sub DAS Kaliwungu Desa Kaliabu, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. (Teknik Penanggulangan Bencana Kekeringan dengan Menggunakan Metode Trans Basin). Retrieved from <http://eprints.upnyk.ac.id/18106/>